

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus stunting bukanlah sesederhana berat badan dan tinggi yang tidak proporsional pada usia tertentu, faktor kejadian stunting sangat kompleks seperti yang dibahas Susanty (2020) , stunting dipengaruhi oleh akses pelayanan kesehatan dan sosial ekonomi keluarga. Terbatasnya kesadaran akan pentingnya memanfaatkan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin dan buruknya kondisi sosial ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu, riwayat menyusui, riwayat pemberian makanan pendamping ASI hingga terjadinya pertumbuhan abnormal. Prevalensi stunting di Indonesia mencapai 6,3 juta kasus yang berarti 21,6% jumlah balita di Indonesia menderita stunting ,angka ini lebih rendah dibandingkan kasus stunting global yang mencatat lebih dari 148 juta kasus dimana 22,3% balita diseluruh dunia mengalami stunting (UNICEF/WHO/WORLD BANK, 2021).

Dampak terjadinya stunting adalah *irreversible* atau tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi stunting sebaiknya diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya stunting. Namun demikian, hal ini bukan berarti anak-anak yang sudah stunting tidak ditangani. Anak-anak yang sudah stunting tetap memerlukan penanganan yang cepat agar gizinya tercukupi dan perkembangan otaknya tetap optimal Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk menurunkan angka stunting, dimulai dengan pembuatan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, atau Stranas Stunting. Lebih dari 20 kementerian dan lembaga , seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, serta lembaga non-pemerintah, terlibat dalam menjalankan program ini.

Menurut Raikhani et al., (2022) pencegahan stunting tercapai dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Salah satu bentuk gizi sensitif adalah pangan bergizi yang dapat di intervensi dengan memperluas bantuan pangan non tunai dalam program ketahanan pangan,bersinergi dengan program bantuan stunting lainnya, diharapkan capaian program ini dapat memenuhi

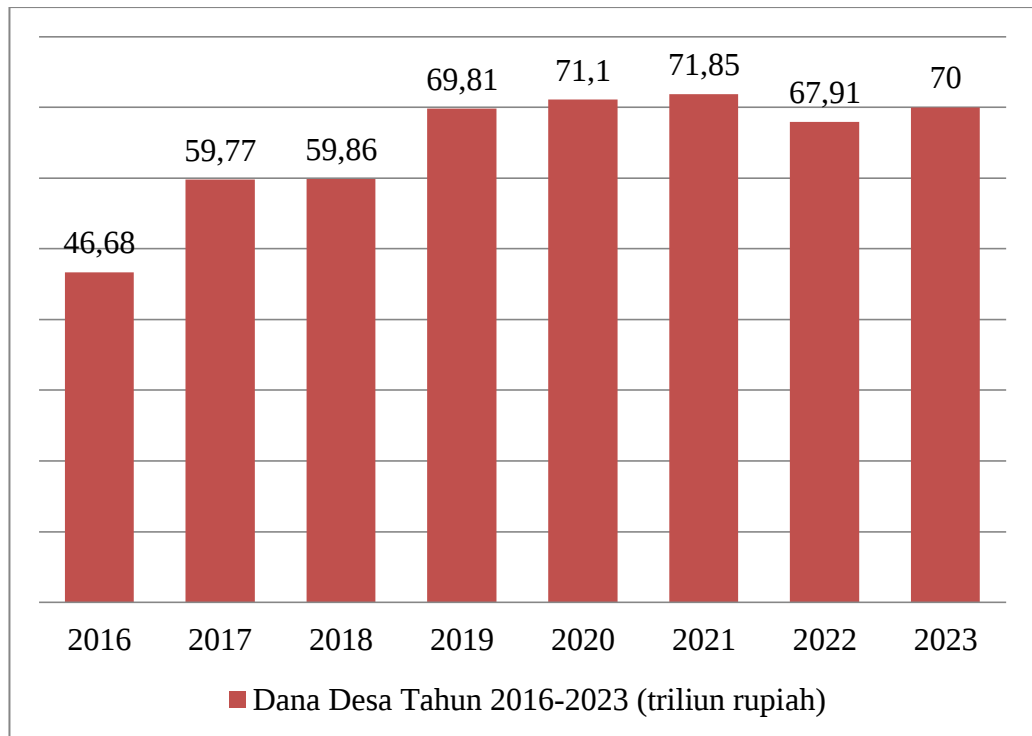
kebutuhan pangan masyarakat dan menurunkan angka stunting. Prevalensi stunting dalam 5 tahun terakhir menunjukkan hasil baik dengan penurunan mencapai 9,3% poin dan disertai perbaikan gizi ibu hamil maupun anak Balita.

Prevalensi stunting dalam hitungan nasional menunjukkan hasil yang baik, namun beberapa daerah masih dalam kasus stunting tinggi. Sebagai upaya percepatan pengentasan stunting ditunjuk kabupaten, kota, dan/atau desa dengan berbagai pertimbangan tertentu sebagai percontohan. Salah satu kabupaten percontohan adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Percontohan ini dirumuskan dalam konsep lokasi fokus yang ditetapkan dengan berbagai pertimbangan salah satunya berdasarkan jumlah kasus stunting daerah lokus melebihi angka prevalensi global yang dirilis WHO (Munira,2022).

Pemerintah memobilisasi dan mengkonsolidasikan berbagai sumber anggaran untuk mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting pada periode 2018 – 2023, baik itu yang teralokasikan melalui belanja K/L, transfer ke daerah dan Dana Desa. Pendanaan sebesar 72 triliun rupiah dianggarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di tingkat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan bersama dalam musyawarah desa. Pemanfaatan alokasi dana desa ini tetap berpedoman pada prioritas penggunaan dana desa yang diterbitkan kementerian terkait setiap tahunnya.

Desa merupakan representasi kehidupan masyarakat umum Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengatur desa sebagai penyambung kesejahteraan masyarakat. Desa diharapkan memanfaatkan potensinya untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2018). Sejak tahun 2016, pemerintah Indonesia memberikan pendanaan kepada desa untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam menjalankan program secara merata dan berkeadilan.

Pemerintah desa mengelola dana ini untuk mendukung pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Pendanaan ini mencakup peningkatan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomian desa, memutus gap pembangunan antardesa diikuti penguatan peran masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan (Kementerian Keuangan, 2021).



Gambar 1. Dana Desa Tahun 2016-2023

Sumber : [Dashboard | TP2S – Dashboard Pemantauan Terpadu Percepatan Pencegahan Stunting](#)

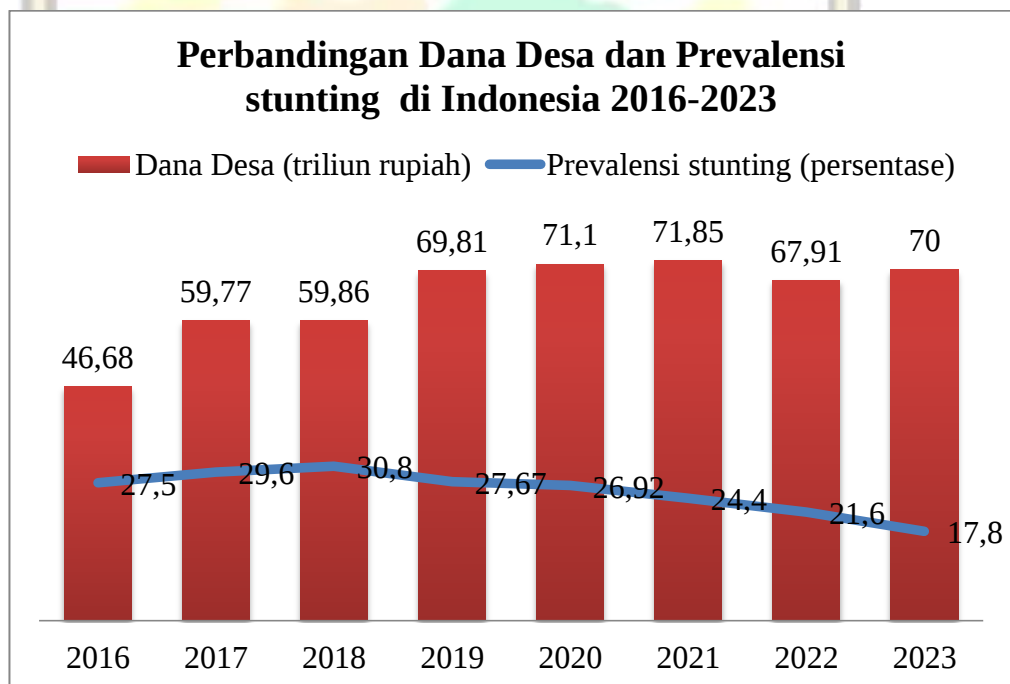
Berdasarkan gambar 1. dapat disimpulkan bahwa dana desa meningkat setiap tahun dari tahun 2016 hingga 2021. Pada tahun 2022, turunnya dana desa yang disalurkan sebagai dampak alih fokus pemerintah yang berkonsentrasi pada masalah COVID-19 dan persiapan kebangkitan ekonomi pasca COVID-19. Saat ini, desa di Indonesia memperoleh alokasi dana desa berkisar antara 1,1 miliar hingga 1,3 miliar pada tahun 2023. Hingga tahun 2022, total dana desa yang telah disalurkan mencapai 468,9 triliun.

Besaran dana desa ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kondisi geografis. Ketentuan ini merujuk pada **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014** tentang Dana Desa yang bersumber dari **APBN** Silitonga (2021) , besaran anggaran dana masing-masing desa berbeda jumlahnya. Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 ini mendapat anggaran 950 miliar rupiah yang tersebar 928 desa di 14 kabupaten/kota. Daerah yang paling banyak mendapat dana desa dari pagu total

Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan anggaran 135 miliar rupiah untuk 182 desa di 15 kecamatan.

Pemanfaatan dana desa secara maksimal mengacu pada prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 seperti operasional pemerintahan desa, program pengentasan stunting , program pemberdayaan ekonomi, program ketahanan pangan, dan program prioritas desa lainnya (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,2022). Desa diharapkan berkontribusi dalam pencapaian **Sustainable Development Goals (SDGs) Nasional**, khususnya dalam menurunkan angka stunting. Upaya ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2, yaitu menghapus kelaparan, mengatasi segala bentuk malnutrisi, serta mewujudkan ketahanan pangan (Sahdan, 2022).

Pemerintah Indonesia mempersiapkan desa sebagai ujung tombak upaya pemberantasan stunting (Meirza & Bawono,2021). Dalam hal ini, kegiatan tersebut diputuskan melalui musyawarah desa. Besaran Dana Desa yang dialokasikan mempertimbangkan jumlah kasus stunting dan pembiayaan program penanganan stunting yang diprakarsai pemerintah desa (Kementerian Desa dan PDTT, 2017). Program tersebut diharapkan memberikan hasil yang maksimal sebagai bentuk keberhasilan desa dan dana desa.



Gambar 2. Perbandingan dana desa dan prevalensi stunting di Indonesia
Sumber : Hasil pengolahan data, 2024

Berdasarkan Gambar 2. data mengenai besaran **dana desa yang disalurkan dan jumlah kasus stunting di Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun terakhir** memperlihatkan adanya peningkatan dana desa yang justru diikuti dengan naiknya prevalensi stunting. Hal ini terjadi karena pada masa tersebut belum terdapat program yang secara khusus diarahkan untuk menanggulangi stunting. Namun, pada tahun 2019–2023 prevalensi stunting menurun setiap tahun hingga mencapai 17,8%, langkah yang tepat untuk mencapai target strategi nasional Indonesia pada tahun 2024.

Tren tersebut tercermin pada kondisi Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 182 desa dan mengantongi dana desa sebesar 135 milyar rupiah, lebih besar dari sejumlah daerah lain di tingkat provinsi, diikuti oleh jumlah kasus stunting yang tinggi yaitu sebesar 29,8%. Penyebab stunting sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan, karena ketidakmampuan menyediakan makanan bergizi. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan relatif tinggi, namun kasus stunting di daerah ini mayoritas disebabkan kesalahan pola asuh dan terjadi pada balita yang berasal dari keluarga mampu.

Dengan beberapa informasi tersebut maka perlu dianalisa bagaimana dana desa efektif menurunkan kasus stunting melalui program yang berkembang di desa. Berdasarkan penjabaran diatas, penelitian ini diberi judul “Efektivitas Program Dana Desa Terhadap Prevalensi Stunting Di Kabupaten Pesisir Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah disampaikan sebelumnya, muncullah keingintahuan peneliti untuk mengkaji:

1. Bagaimana efektivitas program pemberian makanan tambahan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Bagaimana efektivitas program bantuan langsung tunai dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan ?
3. Bagaimana efektivitas program ketahanan pangan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kondisi yang disampaikan dan masalah yang dirumuskan , penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan efektivitas program pemberian makanan tambahan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan .
2. Menjelaskan efektivitas program bantuan langsung tunai dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan .
3. Menjelaskan efektivitas ketahanan pangan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan serta direkomendasikan dari hasil kajian atau penelitian empiris ini meliputi:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan,\khususnya terkait pemanfaatan dana desa dan upaya penanganan stunting. Diharapkan pula adanya pembaruan kajian mengenai indikator serta metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan, penelitian ini dapat menjadi referensi serta bahan evaluasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait penggunaan dana desa untuk menanggulangi stunting.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Menghindari penelitian yang tidak terfokus, diperlukan batasan dan cakupan kajian yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana desa dengan menjalankan berbagai program desa dalam menurunkan prevalensi stunting. Objek penelitian adalah desa di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 182 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.